

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berkelanjutan yang bertujuan mencapai kondisi yang lebih baik sesuai dengan norma-norma tertentu. Dalam konteks negara berkembang, pembangunan ekonomi memegang peran untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pada pertumbuhan pendapatan tetapi juga mencakup perubahan struktural dalam masyarakat, peningkatan produktivitas, dan penciptaan kesempatan kerja yang luas. Tujuan utama dari pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Dalam kerangka ini, setiap daerah di Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja ekonominya guna memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu provinsi yang memiliki peran strategi dalam perekonomian Indonesia adalah Jawa Timur. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

¹ Ita Pingkan F Rorong, Syuli Mamoto, Daisy S.M. Engka, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2003-2018," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23 No. 8, no. 8 (2023): 41–43.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB di Jawa (2024)

Indicator	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Barat
Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c)	4,93%	4,95%	4,95%
Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y)	5,03%	4,96%	5,02%
Kontribusi ke Ekonomi Pulau Jawa	25,23%	14,48%	22,49%
Kontribusi ke Ekonomi Nasional (38 Provinsi)	14,39%	8,25%	12,82%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Jawa yakni sebesar 25,23% melampaui tiga provinsi terbesar di Pulau Jawa. Kontribusinya terhadap produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional juga tercatat paling tinggi diantara ketiganya yaitu sebesar 14,39%. Dengan kontinbusi ekonomi yang besar serta paron strategis dalam perekonomian nasional, Jawa Timur mencerminkan dinamika wilayah yang kaya akan potensi sosial dan ekonomi untuk ditelaah lebih lanjut. Hal ini terlihat dari tingginya mobilitas penduduk, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi serta keragaman karakteristik masyarakat yang terus berkembang.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebanyak 40,66 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 41,81 ribu jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan adanya pertumbuhan alami serta migrasi, yang turut berdampak pada dinamika pasar tenaga kerja di provinsi ini. berikut adalah data jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2021 sampai 2024:

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2021–2024 (ribu jiwa)

Provinsi	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	40.665,7	40.921,1	41.230,0	41.814,5
Jawa Tengah	36.516,0	36.811,1	37.180,4	37.892,3
Jawa Barat	48.274,2	48.738,8	49.306,8	50.345,2
DKI Jakarta	10.562,1	10.605,4	10.640,0	10.684,9
Banten	11.904,6	12.023,0	12.167,0	12.431,4
DI Yogyakarta	3.668,7	3.687,8	3.712,6	3.759,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Peningkatan jumlah penduduk di Jawa Timur berdampak langsung pada bertambahnya angkatan kerja, yang berarti semakin banyak individu yang memasuki pasar tenaga kerja dan mencari pekerjaan. Namun, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan dunia industri. Sistem ketenagakerjaan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, di mana peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan yang memadai.

Meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja. Provinsi Jawa Timur telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonominya. Hal ini menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Berikut adalah data ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sampai dengan 2024:

Tabel 1. 3
Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran Terbuka
2021	22.319.145	21.037.750	1.281.395
2022	22.869.012	21.613.293	1.255.719
2023	23.868.764	22.703.177	1.165.587
2024	24.381.761	23.361.110	1.020.651

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data tabel 1.3 jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten, dari 22.319.145 orang pada tahun 2021 menjadi 24.381.761 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah individu usia produktif yang siap memasuki pasar kerja. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 21.037.750 orang pada tahun 2021 menjadi 23.361.110 orang pada tahun 2024.. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 1.281.395 orang pada tahun 2021 menjadi 1.020.651 orang pada tahun 2024. Namun, di tengah jumlah positif tersebut, penting dicermati bahwa peningkatan tersebut belum merata di seluruh wilayah. Berikut disajikan data penempatan/pemenuhan tenaga kerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021–2024 yang memperlihatkan variasi kinerja antarwilayah

Tabel 1. 4
Pemenuhan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Pacitan	1.417	2.269	1.282	942
2.	Kab. Ponorogo	1.389	2.836	1.600	1.203
3.	Kab. Trenggalek	724	2.024	1.155	851
4.	Kab. Tulungagung	937	3.351	1.895	1.395
5.	Kab. Blitar	1.729	4.078	2.317	1.690
6.	Kab. Kediri	3.268	10.258	5.828	4.277
7.	Kab. Malang	4.207	9.912	5.673	4.152
8.	Kab. Lumajang	1.098	3.447	1.995	1.463
9.	Kab. Jember	3.809	1.161	676	499
10.	Kab. Banyuwangi	2.497	3.916	2.253	1.656
11.	Kab. Bondowoso	1.053	1.675	947	692
12.	Kab. Situbondo	890	2.792	1.561	1.168
13.	Kab. Probolinggo	2.094	4.348	2.484	1.838
14.	Kab. Pasuruan	3.718	18.312	10.469	7.646
15.	Kab. Sidoarjo	6.890	28.324	16.267	11.923
16.	Kab. Mojokerto	3.628	18.362	10.504	7.703
17.	Kab. Jombang	3.357	10.535	6.009	4.402
18.	Kab. Nganjuk	2.267	7.115	4.120	3.029
19.	Kab. Madiun	2.442	7.671	4.403	3.233
20.	Kab. Magetan	2.030	6.371	3.634	2.655
21.	Kab. Ngawi	2.033	2.621	1.528	1.168
22.	Kab. Bojonegoro	1.451	2.296	1.332	987
23.	Kab. Tuban	457	4.808	2.725	1.997
24.	Kab. Lamongan	1.901	3.268	1.853	1.373
25.	Kab. Gresik	5.701	19.177	10.983	8.077
26.	Kab. Bangkalan	821	3.457	1.977	1.441
27.	Kab. Sampang	718	2.253	1.291	953
28.	Kab. Pamekasan	1.561	2.188	1.232	862
29.	Kab. Sumenep	741	1.458	820	579
30.	Kota Kediri	838	3.321	1.892	1.395
31.	Kota Blitar	481	3.213	1.842	1.35
32.	Kota Malang	3.220	10.106	5.755	4.22
33.	Kota Probolinggo	568	3.997	2.260	1.656
34.	Kota Pasuruan	860	2.698	1.556	1.203
35.	Kota Mojokerto	529	1.661	939	692
36.	Kota Madiun	807	3.241	1.852	1.373
37.	Kota Surabaya	12.347	42.154	24.269	17.743
38.	Kota Batu	1.576	9.418	5.402	3.959
	Jawa Timur	86.054	270.092	154.580	113.446

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berikut tabel 1.5 yang menyajikan data mengenai penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis kegiatan. Data ini memberikan gambaran tentang partisipasi penduduk dalam pasar tenaga kerja dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di provinsi tersebut.

Tabel 1. 5
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2022–2024
Table 1 Population 15 Years of Age and Over by Type of Activity, 2022–2024

Jenis Kegiatan Type of Activity	Agustus/August 2022	Agustus/August 2023	Agustus/August 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas <i>Population 15 Years of Age and Over</i>	32.106.491	32.895.175	33.193.131
Angkatan Kerja/Economically Active	22.869.012	23.868.764	24.381.761
Bekerja/Working	21.613.293	22.703.177	23.361.110
Pengangguran Terbuka/Unemployment	1.255.719	1.165.587	1.020.651
Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	9.237.479	9.026.411	8.811.370
Sekolah/Attending School	2.038.831	2.256.640	2.219.326
Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	5.980.649	5.564.856	5.497.944
Lainnya/Others	1.217.999	1.204.915	1.094.100
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) <i>Labor Force Participation Rate (%)</i>	71,23	72,56	73,45
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) <i>Unemployment Rate (%)</i>	5,49	4,88	4,19
Pekerja Tidak Penuh <i>Less than Normal Working Hours</i>	7.303.446	7.436.124	7.855.902
Setengah Penganggur/Underemployment	1.246.057	1.302.671	1.648.862
Paruh Waktu/Part-time Worker	6.057.389	6.133.453	6.207.040

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.5 aspek ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur mencerminkan adanya perkembangan positif dalam partisipasi angkatan kerja meskipun tantangan dalam kualitas pekerjaan masih tetap ada. Pada Agustus 2023, jumlah pekerja tidak penuh mencapai 7,43 juta orang, yang terdiri dari 1,30 juta orang setengah penganggur dan 6,13 juta orang pekerja paruh. Sementara pada Agustus 2024, jumlah ini meningkat menjadi 7,86 juta orang dengan 1,65 juta orang setengah penganggur dan 6,21 juta orang pekerja paruh waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam jam kerja dan produktivitas. Untuk itu kualitas lapangan

kerja masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan keterampilan dan penyediaan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan kenetagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sering dikaitkan dengan peningkatan kesempatan kerja, sementara kebijakan terkait upah minimum dan tingkat pendidikan turut menentukan daya serap tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja melalui ekspansi sektor industri dan peningkatan investasi.²

Pertumbuhan ekonomi merupakan isu ekonomi jangka panjang yang saat ini menjadi fenomena penting di dunia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditunjukkan melalui kenaikan pendapatan nasional. Sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, karena berperan sebagai salah satu indikator utama.³

Menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat

² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024*, 2021.

³ Fadhila Aulia Yanda, Sri Endang Saleh, and Sri Indriyani. S Dai, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi,” *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 4, no. 2 (2022): 101–111.

meningkatkan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini ditegaskan juga oleh Fivian dkk bahwa faktor pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.⁴ Studi empiris oleh Dewi Nur Mawanti dan Ruth Eviana Hutabarat menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dalam periode tertentu.⁵ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha dihitung dari total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.⁶

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6
Produk Domestik Regeonal Bruto
Jawa Timur 2021–2024 (miliar rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Pacitan	16.381	17.986	19.491	20.657
2.	Kab. Ponorogo	21.350	23.028	25.248	27.047
3.	Kab. Trenggalek	19.198	20.882	22.740	24.365
4.	Kab. Tulungagung	40.167	44.133	47.964	51.247
5.	Kab. Blitar	37.820	41.379	44.892	47.779
6.	Kab. Kediri	42.693	46.650	50.638	54.650
7.	Kab. Malang	107.036	117.422	128.373	138.423
8.	Kab. Lumajang	33.679	36.664	40.073	43.059
9.	Kab. Jember	81.069	88.030	95.290	102.758
10.	Kab. Banyuwangi	85.919	93.279	101.297	108.923
11.	Kab. Bondowoso	21.052	22.902	24.773	26.543

⁴ Fivien Muslihatinningsih, Miftahul Walid, and I Wayan Subagiarta, “Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur,” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 1.

⁵ Dewi Nur Mawanti and Ruth Eviana Hutabarat, “Pengaruh Tingkat Pendidikan , PDRB , Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2020-2022” 3, no. 5 (2024): 1309–1316.

⁶ Listiana, “Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Menurut Lapangan Usaha,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).

12.	Kab. Situbondo	21.201	23.129	25.225	27.102
13.	Kab. Probolinggo	35.606	38.933	42.377	45.675
14.	Kab. Pasuruan	157.151	172.654	186.946	201.665
15.	Kab. Sidoarjo	210.650	245.227	273.698	296.887
16.	Kab. Mojokerto	87.145	95.798	104.364	113.130
17.	Kab. Jombang	41.747	45.936	49.984	53.899
18.	Kab. Nganjuk	28.053	30.820	33.647	36.271
19.	Kab. Madiun	20.024	21.859	23.833	25.549
20.	Kab. Magetan	19.588	21.195	22.922	24.577
21.	Kab. Ngawi	20.814	22.455	24.325	25.945
22.	Kab. Bojonegoro	84.201	100.493	97.972	101.794
23.	Kab. Tuban	65.912	75.188	81.860	87.111
24.	Kab. Lamongan	41.043	45.441	48.927	52.077
25.	Kab. Gresik	144.656	163.908	176.261	188.605
26.	Kab. Bangkalan	24.757	27.164	27.740	28.739
27.	Kab. Sampang	20.639	23.009	24.087	24.882
28.	Kab. Pamekasan	17.659	19.263	20.881	22.492
29.	Kab. Sumenep	35.300	40.255	42.967	45.222
30.	Kota Kediri	141.467	152.778	159.737	168.749
31.	Kota Blitar	7.114	7.834	8.515	9.188
32.	Kota Malang	76.617	84.807	93.053	100.117
33.	Kota Probolinggo	11.700	12.931	14.296	15.375
34.	Kota Pasuruan	8.491	9.453	10.400	11.208
35.	Kota Mojokerto	6.936	7.637	8.039	8.612
36.	Kota Madiun	14.435	15.819	17.256	18.653
37.	Kota Surabaya	590.227	655.616	715.295	772.494
38.	Kota Batu	16.841	18.588	20.525	22.154

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 1.6 Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2021–2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, namun belum merata di seluruh wilayah. Beberapa kota/kabupaten mencatat nilai PDRB yang tinggi, sementara daerah lain masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Ketimpangan ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang juga tidak seimbang antarwilayah. Hal ini juga diungkapkan oleh Murniati yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka.⁷ Demikian pula,

⁷ Murniati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi Di Kabupaten Malang,”

Aiswara dan Retno menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di wilayah dengan TPT tinggi.⁸ Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sangat penting untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan kesejahteraan di seluruh wilayah.

Teori upah efisiensi menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras, mengurangi tingkat absensi, dan meningkatkan loyalitas pekerja. Dalam kondisi pasar monopsoni, di mana perusahaan besar mendominasi dan pekerja tidak memiliki banyak pilihan, kenaikan upah minimum justru menguntungkan karena mengoreksi upah yang sebelumnya terlalu rendah, meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap. Sebaliknya dalam kondisi pasar persaingan sempurna, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi sehingga perusahaan cenderung menekan jumlah pekerja yang direkut. Kebijakan upah minimum sendiri diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 90 Ayat 1 menegaskan bahwa: "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.*"⁹

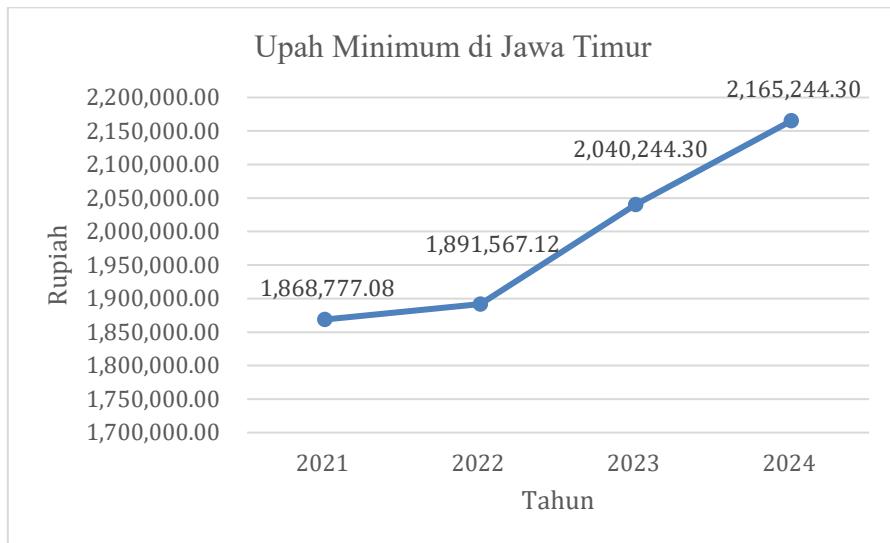
SEIKO: Journal of Management & Business 4, no. 2 (2021): 189–202, <https://www.jurnal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/1951>.

⁸ Aiswara Arasy Restianjani and Retno Febriyastuti Widyawati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Penduduk , Penanaman Modal Negeri Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2015-2022" 07, no. 1 (2025): 1–16.

⁹ Attifah Meita Rahmah and Indri Arrafi Juliannisa, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat," *Ikraith-Ekonometika* 5, no. 3 (2022): 246–254.

Berikut adalah data upah minimum di Jawa Timur tahun 2021–2024:

Gambar 1. 1
Upah Minimum di Jawa Timur Periode 2021-2024 (rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar 1. 1 dapat dilihat bahwa upah minimum di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2021 hingga 2024. Tren ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menyesuaikan tingkat upah dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup layak masyarakat. Kebijakan tersebut juga memiliki dasar hukum yang lebih rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa upah minimum adalah jumlah upah bulanan terendah yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja atau buruh, baik berupa upah pokok tanpa tunjangan maupun kombinasi upah pokok dan tunjangan tetap, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur di setiap provinsi. Tujuannya adalah menjamin kesejahteraan dasar pekerja serta mencegah praktik eksplorasi, terutama bagi tenaga kerja

dengan keterampilan rendah. Kebijakan ini juga diharapkan menjaga daya beli pekerja serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.¹⁰

Perdebatan mengenai upah minimum muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara serikat pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja umumnya menuntut kenaikan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, sedangkan pengusaha sering menilai kebijakan ini sebagai beban yang dapat memperlambat pertumbuhan usaha dan menghambat perluasan lapangan kerja. Dari perspektif teori permintaan tenaga kerja, terdapat hubungan negatif antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang diminta, di mana perusahaan akan menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan mempertimbangkan *Value Marginal Physical Product of Labor (VMPP)* atau nilai tambah yang dihasilkan tenaga kerja terhadap produksi. Pertimbangan ini menjadi dasar penyesuaian jumlah tenaga kerja yang direkrut, khususnya ketika struktur biaya tenaga kerja mengalami perubahan akibat kenaikan upah minimum.¹¹

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain meningkatkan pengetahuan, pendidikan juga meningkatkan kemampuan kerja yang berpotensi memengaruhi tingkat pendapatan. Menurut Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar,

¹⁰ Muhammad Effendi A Alamsyah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014–2018,” *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 3, no. 2 (2020): 1–9.

¹¹ Gea Dwi Asmara, Rahmat Saleh, and Galuh Jati Asmara, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2015-2020,” *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management* 1, no. 3 (2024): 1–11.

menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar ditujukan bagi anak usia 7–15 tahun melalui SD/MI dan SMP/MTs. Pendidikan menengah berlangsung tiga tahun di SMA/MA atau SMK. Sementara itu, pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, magister, hingga doktor yang bertujuan mencetak tenaga profesional dan inovator di berbagai bidang.¹²

Teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, membuka peluang pekerjaan dengan kesejahteraan lebih baik. Kualitas pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Studi empiris menunjukkan bahwa tenaga kerja berpendidikan tinggi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri. Rosi Noviendri menemukan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, meski terkadang terjadi ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.¹³ Tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke atas lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan tetap. Namun, penyerapan tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan tetapi juga faktor ekonomi, kebutuhan industri, dan kebijakan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting memastikan keselarasan pendidikan dengan dunia kerja.¹⁴

Tingkat pendidikan yang memadai tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja di pasar.

¹² Kiki Asmara Aldo Prayoga Dinata, “Analisis Pengaruh PDRB Sektor Jasa, Tingkat Pendidikan Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Jasa Di Kota Surabaya 1Aldo,” *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 15, no. 1 (2024): 37–48.

¹³ Rosi Noviendri, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Privinsi Jawa Timur” (Universitas Brawijaya Malang, 2020).

¹⁴ Mawanti and Hutabarat, “Pengaruh Tingkat Pendidikan , PDRB , Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2020-2022.”

Namun, disparitas tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Timur masih menjadi tantangan, terutama di kalangan masyarakat dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Berikut adalah gambaran Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1. 7
Angkatan Kerja di Jawa Timur Menurut Pendidikan (orang)

Tahun	Tidak Punya Ijazah SD/SD Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/MA	SMK	Akademi (D1/D2/D3)	Perguruan Tinggi /D4/S2/S3
2021	9.249.983	4.106.034	3.666.376	2.905.241	383.897	2.007.614
2022	10.020.225	4.116.741	3.726.809	2.782.661	336.422	1.886.154
2023	9.589.266	4.442.564	4.173.832	3.253.113	380.098	2.029.891
2024	9.638.180	4.418.289	4.290.428	3.380.476	392.506	2.261.882

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan Tabel 1.7 mayoritas angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021-2024 berasal dari kelompok dengan pendidikan rendah (Tidak Punya Ijazah SD/SD Sederajat), meskipun jumlahnya cenderung fluktuatif. Sementara itu, angkatan kerja berpendidikan SMP/Sederajat, SMA/MA, dan terutama SMK menunjukkan peningkatan signifikan, mencerminkan minat yang lebih besar terhadap pendidikan vokasi. Kelompok dengan pendidikan tinggi (Akademi dan Perguruan Tinggi) juga mengalami pertumbuhan moderat, meskipun jumlahnya masih jauh lebih kecil. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi menunjukkan adanya upaya individu untuk meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Namun, dominasi kelompok berpendidikan rendah masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan akses dan kualitas pendidikan,

terutama yang relevan dengan kebutuhan industri, guna memastikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja juga diikuti dengan peningkatan kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Tabel 1. 8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	Upah Minimum (rupiah)	Tingkat Pendidikan (tahun)	Tenaga Kerja (orang)
2021	3,57	Rp1.868.777,08	7,88	22.319.145
2022	5,34	Rp1.891.567,12	8,03	22.869.012
2023	4,95	Rp2.040.244,30	8,11	23.868.764
2024	4,93	Rp2.165.244,30	8,28	24.381.761

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tenaga kerja di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah minimum, dan bertambahnya rata-rata lama sekolah penduduk. Kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan yang potensial antara variabel-variabel tersebut dengan dinamika ketenagakerjaan. Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja belum tentu sepenuhnya menggambarkan perbaikan dalam struktur pasar kerja. Dalam praktiknya, tidak semua pekerjaan yang tersedia bersifat layak, berkelanjutan, atau sesuai dengan latar belakang pendidikan stenaga kerja. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar pekerjaan masih berada di sektor informal atau bersifat sementara. Pemahaman yang lebih objektif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja menjadi hal penting dalam menilai arah pembangunan ketenagakerjaan.

Penelitian yang ada sebelumnya juga memperlihatkan hasil yang beragam terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Maryani dan Samtono di Kota Salatiga menunjukkan bahwa tidak semua variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama karena kontribusi sektor ekonomi yang belum optimal dalam menyerap tenaga kerja. Sementara itu, penelitian oleh Syuli Mamoto et al. di Provinsi Sulawesi Utara menemukan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan secara individu, meskipun secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.¹⁵ Di sisi lain, penelitian oleh Attifah Meita Rahmah et al. di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh signifikan.¹⁶ Adapun Rahmatin dkk. menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,¹⁷ menunjukkan bahwa perbedaan kondisi regional dan struktur ekonomi di masing-masing daerah dapat mempengaruhi hasil penelitian.

¹⁵ Syuli Mamoto, Daisy S.M. Engka, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2003-2018.”

¹⁶ Attifah Meita Rahmah and Indri Arrafi Juliannisa, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat,” *Ikraith-Ekonomika* 5, no. 3 (2022): 246–254.

¹⁷ Kukuh Arisetyawan Nur Ihriza Rahmatin, Sheptia Dwi Imroatus Solekha, Sheptia Dwi Imroatus Solekha, Aprillia Nilasari, “Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Banten,” *INDEPENDENT: Journal Of Economics* 4, no. 2 (2024): 120–130.

Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Dengan fokus pada periode 2021-2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut, termasuk dampak kebijakan lokal terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta mengurangi ketimpangan dalam dunia kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024 ?
2. Bagaimana upah minimum di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024 ?
3. Bagaimana tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024?
4. Bagaimana penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024 ?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2024?
6. Bagaimana pengaruh upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2024?

7. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2024?
8. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024
2. Untuk mengetahui upah minimum di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024
3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024
4. Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024.
8. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2021–2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah literatur dalam bidang ekonomi ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan konsep yang relevan untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, sehingga dapat memperkuat landasan ilmiah dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Rekomendasi yang diberikan mencakup pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penetapan kebijakan upah minimum yang adil, dan upaya peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga

kerja, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b. Bagi Dunia Usaha

Penelitian ini menyediakan informasi yang relevan mengenai hubungan antara kebijakan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja, yang dapat digunakan pelaku usaha dalam merancang strategi bisnis khususnya pengelolaan sumberdaya manusia. Pemahaman ini membantu optimalisasi kebijakan internal guna meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan karyawan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dengan memahami hubungan antara pendidikan, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja masyarakat diharapkan terdorong untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi individu dalam merencanakan pengembangan diri untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membantu peneliti memahami sejauh mana pemahaman topik penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini, sebagai berikut:

1. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga.* Jurnal Tri Maryani1 & Samtono (2023).¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel berpengaruh signifikan, terutama karena kontribusi sektor ekonomi yang belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2021-2024. Persamaan penelitian ini ialah variabel yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

2. *Analisis UMK, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur Periode 2020–2021.* Tesis Arif Puji Satrio Laksono (2022).¹⁹

Penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK), produk domestik regional bruto (PDRB), dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan merupakan data panel tahun 2020–2021 yang diperoleh dari BPS Jawa

¹⁸ Tri Maryani and Samtono Samtono, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2023): 102–109.

¹⁹ A P S Laksono, “Analisis UMK PDRB Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2021” (IAIN Kediri, 2022), https://etheses.iainkediri.ac.id/7537/3/92501020001_BA_B_II.pdf.

Timur dan instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK dan variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel investasi justru berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Perbedaan penelitian terletak pada variabel independennya, penelitian tersebut menggunakan UMK, PDRB, dan investasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan. Selain itu, penelitian tersebut hanya mencakup periode 2020–2021, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup periode yang lebih panjang yaitu 2021–2024. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dan menggunakan metode regresi data panel dengan aplikasi Eviews.

3. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.* Jurnal Rahmah dan Juliannisa (2022).²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut baik secara parsial maupun simultan dalam perioden 2015–2020. Dengan menggunakan metode data panel, penelitian ini mengkaji enam Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki tingkat pendidikan dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga

²⁰ Rahmah and Juliannisa, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.”

kerja, sedangkan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen tersebut.

Perbedaan utama penelitian ini terletak pada cakupan wilayah dan periode penelitian. Selain itu, penelitian ini memusatkan PDRB sebagai salah satu variabel independen, sementara penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi secara umum. Adapun persamaan penelitian keduanya ialah sama-sama meneliti pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. *Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Banten.* Jurnal Kukuh Arisetyawan dkk (2024).²¹

Penlitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dalam waktu 2019-2023. Metode analisis yang terapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12 untuk mengolah data dan memperoleh hasil yang lebih akurat. Hasil penelitian bahwa secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada cakupan wilayah dan periode penelitian. Adapun

²¹ Nur Ihriza Rahmatin, Sheptia Dwi Imroatus Solekha, Sheptia Dwi Imroatus Solekha, Aprillia Nilasari, "Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Banten."

penelitian ini memiliki kesamaan dalam variabel yang dikaji yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan sebagai faktor yang memngaruhi penyerapan tenaga kerja, serta sama-sama menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik sebagai sumber utama.

5. *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia selama Periode 2015-2020.* Jurnal Asmara dkk. (2024)²²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan upah minimum dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan data panel dan pendekatan fixed effect model, penelitian ini menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode yang dikaji. Selain itu, variabel kontrol yaitu tingkat pendidikan dan PDRB juga berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada cakupan wilayah dan periode analisis. Selain itu, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada upah minimum sebagai variabel utama dengan pendidikan dan PDRB sebagai variabel kontrol, sedangkan penelitian ini menganalisis pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara bersamaan sebagai faktor utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Adapun persamaan penelitian ini memiliki

²² Asmara, Saleh, and Asmara, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 2015-2020."

persamaan dalam penggunaan data sekunder dari BPS dan sama-sama bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.